



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Maret 2017

Halaman: 14

BENCANA ALAM

Talut Longsor Dibiarkan

DANUREJAN—Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) DIY Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR menegaskan, tidak akan memberikan rekomendasi maupun perbaikan di sejumlah talut Sungai Code yang ambrol.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Perbaikan talut di khawatirkan dapat melegalkan masyarakat yang ingin mendirikan bangunan di atas sungai. Oleh karena itu BBWSO

▶ **Alat berat tidak memungkinkan masuk ke lokasi.**

▶ **BBWSO akan menelusuri siapa pihak yang memberikan izin mendirikan bangunan.**

DIY akan membiarkan talut ambrol dan hanya membersihkan material yang ada.

Kepala BBWSO DIY Tri Bayu menjelaskan, terkait dengan longornya talut Sungai Code di Terban, Kota Jogja pihaknya sudah mengambil langkah untuk mengambil material longoran secara manual. Mengingat alat berat tidak memungkinkan masuk ke lokasi. Setelah material diangkat dari dasar sungai, BBWSO tidak akan membangun

atau merekomendasikan ke pihak manapun untuk pembangunan talut. Ia ingin membiarkan pasca-longoran itu secara alami.

"Kalau nanti seumpama kami bangun itu sama saja melegalkan bangunan di atasnya. Kami salah secara undang-undang. Kalau kami lebih baik itu tetap alami, dengan catatan tidak ada bangunan di atasnya [sungai]," katanya, Kamis (9/3).

Masyarakat yang tinggal di area longsor, kata dia, mungkin berasumsi memiliki hak atas tanah tersebut. Terutama, jika ternyata memiliki izin, BBWSO akan menelusuri siapa pihak yang memberikan izin mendirikan bangunan di atas lahan yang semesinya tidak diperbolehkan pendirian bangunan permanen atau permukiman. Hal itu dilakukan, bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun sebagai upaya menghasilkan

solusi terbaik, agar longsor serupa tidak terjadi lagi.

"Kalau masyarakat di atasnya mengklaim ini tanah kami [warga] jadi boleh dong kami bangun. Boleh-boleh saja tetapi sesuai aturan, jangan menyalahi aturan. Kalau kami lihat bangunan itu di pinggir sungai kan itu pasti secara aturannya melanggar," kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap kepada pihak terkait untuk melakukan relokasi terhadap warga yang berada di area longsor Sungai Code. Karena talut tidak akan dibangun lagi. Ia mengaku bantaran sungai memang boleh dimanfaatkan warga, namun bukan untuk mendirikan bangunan permanen.

"Diharapkan direlokasi, sekarang pemerintah membuat program kaitan rusun, bisa merelokasi saudara kita yang bermukim di lereng Code untuk dipindahkan," ujarnya.

BBWSO mempertanyakan, kondisi talut longsor yang sebelumnya dibangun dengan permanen tersebut. Pihaknya telah menanyakan ke Pemkot Jogja, namun instansi tersebut sama sekali tidak melakukan pembangunan talut longsor itu. "Kami menelusuri siapa yang membuat [talut] itu karena dari kami [BBWSO] tidak ada yang membuat, bukan BBWSO. Dinas PU Kota kami tanya, katanya juga tidak, ini kan lucu jadinya." Bahwa instansi yang berwenang di sini sama sekali tidak ada yang membuat tetapi di situ ada bangunan," ucapnya.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan, pihaknya tidak mempersoalkan jika BBWSO merekomendasikan agar talut tidak dibangun, karena sudah menjadi kewenangannya jadi harus ditaati.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Din. PUPKP	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☒ Segera
3.	☒ Netral	☐ Riasa
4.		

☒ Untuk Diketahui
☐ Untuk Diketahui
☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005